



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

LKJIP

TAHUN 2024

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kebumen dapat menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta sebagai wujud implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada dokumen perencanaan strategis BPBD Kabupaten Kebumen. LKJIP ini memberikan gambaran pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta evaluasi terhadap efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan ini masih terdapat kendala dan tantangan yang perlu terus diperbaiki. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna peningkatan kualitas kinerja BPBD Kabupaten Kebumen di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan ini, termasuk mitra kerja, serta masyarakat yang turut berperan dalam upaya penanggulangan bencana. Semoga LKJIP ini dapat menjadi acuan dalam peningkatan kualitas layanan publik dan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien di Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 31 Januari 2025

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Kebumen



Drs. Udy Cahyono, M.Si
Pembina Utama Muda/ IVd
NIP. 196702261986071001

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Fungsi Strategis	4
1.3. Permasalahan Utama Yang Dihadapi	6
1.4. Tindaklanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Perencanaan Strategis	10
2.1.1. Rencana Strategis	10
2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	12
2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	16
2.2. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	19
3.1.1. Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024	19
3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja BPBD Kebumen Tahun 2024 dengan Tahun 2023	20
3.1.3. Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	22
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar	23
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	23
3.1.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	25
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Tujuan dan Sasaran	26
3.1.8. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	29
3.2. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	35
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	35
4.2. Permasalahan/Kendala	36
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	36
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Identifikasi Masalah.....	7
Tabel 2 Tindaklanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	9
Tabel 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD.....	12
Tabel 4 Indikator Kinerja Utama BPBD	15
Tabel 5 Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	17
Tabel 6 Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana	17
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 8 Program dan Anggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen	18
Tabel 9 Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2024	20
Tabel 11 Perbandingan Capaian Kinerja 2023 dan Target 2024	21
Tabel 12 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	22
Tabel 13 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain	23
Tabel 14 Analisis Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi.....	24
Tabel 15 Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	26
Tabel 16 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	28
Tabel 17 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana	31
Tabel 18 Realisasi Anggaran Tahun 2024	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Kebumen	3
Gambar 2 Tantangan dan Permasalahan	7
Gambar 3 Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja	13
Gambar 4 Anggaran BPBD Kebumen Tahun 2024	32

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BPBD;
2. Mendorong BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPBD untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BPBD di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1.1. Gambaran Umum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan di bidang penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD dipimpin Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sedangkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas adalah sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. Kepala BPBD;
- b. Unsur Pengarah BPBD; dan
- c. Unsur Pelaksana BPBD.
- d. Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penanggulangan bencana Daerah, dengan fungsinya adalah:

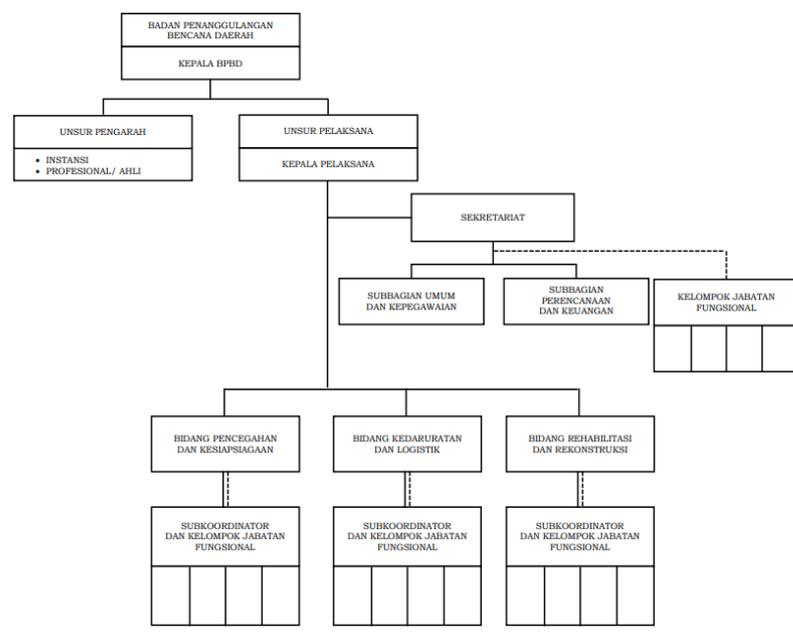
- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah.

Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari dengan secara terintegrasi meliputi: prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Adapun Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pelaksana BPBD;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Kebumen

1.2. Fungsi Strategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan masyarakat dari ancaman bencana, BPBD menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Bencana merupakan ancaman nyata yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian materiil, serta gangguan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan prinsip utama keselamatan masyarakat, kecepatan dan ketepatan tanggap darurat, serta ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

Sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana nasional, BPBD Kabupaten Kebumen memiliki fungsi strategis dalam tiga fase utama penanggulangan bencana, yaitu:

1. Pra Bencana

Pada tahap pra bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko serta dampak bencana. Fungsi strategis BPBD dalam pra bencana adalah untuk mempersiapkan sumber daya, infrastruktur, dan sistem informasi yang dibutuhkan guna menghadapi potensi ancaman bencana di masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bencana, BPBD bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengurangan risiko bencana yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan pemetaan risiko bencana, yang mencakup identifikasi kawasan rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. BPBD juga mengembangkan peta rawan bencana dan dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam melakukan pembangunan yang lebih aman dan berbasis risiko.

Selain pada tugas pencegahan/ mitigasi dalam pra bencana yaitu peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Ini dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan, simulasi, dan pendidikan kebencanaan, guna membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya persiapan menghadapi bencana. BPBD mengorganisir pelatihan bagi relawan dan petugas kebencanaan serta menyusun rencana kontinjensi yang berisi prosedur yang jelas tentang bagaimana masyarakat dan pemerintah harus merespons jika bencana terjadi. Selain itu, BPBD juga mengoptimalkan sistem peringatan dini dan memperkuat infrastruktur pengungsian untuk memastikan bahwa masyarakat dapat segera mendapat perlindungan jika ancaman bencana datang.

Dengan melakukan serangkaian kegiatan tersebut, BPBD Kabupaten Kebumen tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana, tetapi juga sebagai mitigasi risiko dan pemangku kepentingan yang penting dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman bencana.

2. Tanggap Darurat Bencana

BPBD Kabupaten Kebumen memiliki fungsi strategis yang sangat penting dalam tanggap darurat bencana, berperan sebagai garda terdepan dalam penyelamatan, perlindungan, dan pemulihan pascabencana. Dalam situasi darurat, BPBD bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai elemen terkait, termasuk instansi pemerintah, TNI, Polri, Basarnas, PMI, dan masyarakat, untuk bergerak cepat dan efektif.

Sebagai bagian dari struktur komando bencana, BPBD berperan mengambil keputusan operasional berdasarkan data real-time dan analisis situasi yang terjadi di lapangan. Fungsi koordinasi ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih upaya atau keterlambatan dalam pemberian bantuan kepada korban. BPBD juga memiliki tugas utama dalam mengorganisir evakuasi korban dan memastikan ketersediaan tempat pengungsian yang aman serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan fasilitas Kesehatan.

Selain itu, BPBD juga bertugas untuk mengelola sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada masyarakat yang berada di daerah terdampak, meminimalkan potensi korban lebih lanjut. Secara keseluruhan, fungsi strategis BPBD dalam tanggap darurat bencana adalah untuk memastikan respons cepat,

terkoordinasi, dan terarah, serta menyediakan dukungan logistik dan perawatan korban dengan sebaik-baiknya, yang pada akhirnya mendukung proses pemulihan daerah dan masyarakat dari dampak bencana.

3. Pasca Bencana

Fungsi strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam tahap pasca bencana mencakup sejumlah langkah krusial yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan, mengurangi dampak jangka panjang, dan membangun kembali daerah yang terdampak bencana dengan cara yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Peran utama BPBD pada Pasca Bencana adalah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi.

Penilaian kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat bencana menjadi langkah awal yang harus dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak bencana terhadap sektor-sektor penting seperti infrastruktur, ekonomi, dan sosial. BPBD bertanggung jawab untuk menyusun rencana pemulihan yang mencakup prioritas pemulihan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan publik, dan fasilitas penting lainnya yang rusak akibat bencana.

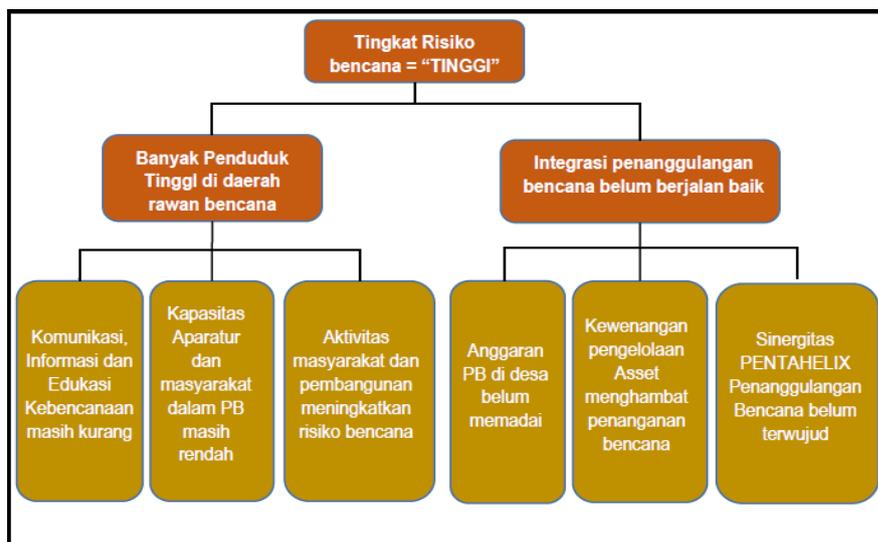
Fungsi strategis BPBD dalam pasca bencana tidak hanya terbatas pada pemulihan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan peningkatan ketangguhan masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kebumen dalam tahap pasca bencana bertujuan untuk mempercepat pemulihan, meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana, serta menciptakan masyarakat yang lebih siap dan tangguh dalam menghadapi bencana di masa depan.

1.3. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Hasil dari Kajian Risiko Bencana (KRB) menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen memiliki risiko tinggi terhadap berbagai jenis bencana, terutama banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, angin kencang, dan kekeringan. Faktor geografis, hidrometeorologi, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat turut memperbesar tingkat kerawanan terhadap bencana.

Dengan adanya risiko tinggi ini, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada wilayah yang memiliki risiko tinggi bencana. Namun, dalam implementasinya, BPBD Kabupaten Kebumen masih menghadapi berbagai tantangan dan

permasalahan yang perlu segera diatasi agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Tantangan dan permasalahan dapat dilihat dari gambar pemetaan berikut:



Gambar 2 Tantangan dan Permasalahan

Berdasarkan gambaran pemetaan tantangan dan permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen dapat dijelaskan pokok masalah sampai dengan akar masalah permasalahan yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Identifikasi Masalah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah
	Kabupaten Kebumen memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi	Banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Informasi kerawanan bencana belum merata bagi penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana; 2. Masih rendahnya kapasitas masyarakat dan aparat dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana; 3. Aktivitas masyarakat serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan justru menaikkan risiko bencana.
		Penanganan bencana yang merupakan urusan Bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia usaha belum terlaksana dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Kebencanaan belum didukung dengan anggaran yang memadai, terutama di Desa-Desa; 2. Kewenangan pengelolaan infrastruktur terkadang menghambat penanganan bencana; 3. Peran Dunia Usaha dalam rangka penanganan bencana masih minim

Sumber: Renstra BPBD Kabupaten Kebumen 2021 s.d 2026

BPBD Kabupaten Kebumen telah memperhatikan isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dalam Rencana Strategis BPBD Kabupten Kebumen Tahun 2021-2026, termuat isu sebagai berikut:

1. Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2025 wilayah rawan bencana di kabupaten Kebumen terdapat pada 408 Desa (88,66%) dari 460 Desa/Kelurahan yang meliputi 9 hazard bencana yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, gempabumi, Tsunami, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem, dan banjir bandang. Kondisi ini menyebabkan wilayah Kabupaten kebumen menjadi salah satu kabupaten yang rawan bencana di Provinsi Jawa Tengah. Melihat besarnya potensi ancaman bencana di kabupaten kebumen, maka upaya pengurangan risiko bencana melalui berbagai kegiatan mitigasi bencana, mutlak untuk dilaksanakan.

2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Banyaknya jumlah Desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana di Kabupaten Kebumen, menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Kebumen dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada semua penduduk yang berada di kawasan rawan bencana. Standar pelayanan Minimal (SPM) dalam Sub-Urusan Bencana yang telah di tentukan oleh kementerian dalam negeri melalui Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, meliputi tiga layanan sebagai berikut:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

3. Peningkatan sinergitas PENTAHELIX Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam perkembangannya, akademisi dan media masa juga memiliki kewajiban untuk turut serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai bidang masing-masing.

1.4. Tindaklanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam surat Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen nomor: 700/IP.RB/24/4/2024 tanggal 28 Juni 2024 hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

Tabel 2 Tindaklanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/ Rekomendasi	Langkah-langkah tindaklanjut
1.	Menyelaraskan rumus penghitungan capaian IKU BPBD dengan capaian IKU yang ada pada Perbup Nomor 82 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dan mengevaluasi capaian IKU agar penghitungannya disesuaikan dengan rumus yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama	Formula penghitungan indikator kinerja utama telah disesuaikan dengan Perbup 81 Tahun 2022 serta evaluasi capaiannya yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Tahun 2024
2.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi atas perjanjian kinerja yang disusun secara berkala yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan kegiatan Rakor POP/K	Pada saat kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (RAPOP KOK) dilaksanakan juga dengan monitoring atas progres kinerja pada Perjanjian Kinerja.
3.	Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP	Telah dilaksanakan penyusunan SOP Pengumpulan Data Kinerja
4.	Menyampaikan analisis capaian kinerja dan upaya yang dilaksanakan dan menyampaikan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja sesuai dengan rumus indikator kinerja utama yang ditetapkan pada dokumen laporan kinerja	Dalam penyusunan laporan kinerja sudah dilaksanakan dengan menyampaikan seluruh informasi capaian kinerja dengan rumus yang ditetapkan dalam Perbup Nomor 82 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2021-2026 memiliki visi besar untuk "**Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat**", dengan fokus pada pencapaian misi yang kelima, yaitu "Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya, dan bermartabat". Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kebumen menyusun rencana strategis yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Rencana strategis ini tidak hanya mencakup upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, tetapi juga mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera. Dengan langkah-langkah konkret dalam peningkatan kapasitas dan kesadaran kebencanaan, BPBD berkomitmen untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang rukun, berbudaya, dan bermartabat, sekaligus mewujudkan Kabupaten Kebumen yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana.

Pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan memerlukan tindak lanjut berupa penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi merupakan cara mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan. Kemudian strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan

daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Selain itu, perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan tools yang dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan pembangunan menjadi panduan dalam penentuan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun strategi dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD

Visi: <i>Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat</i>			
Misi Ke 5: Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 5.2: Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Sasaran 5.2.2: Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Strategi 5.2.2: Peningkatan kapasitas desa tangguh bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan informasi kebencanaan yang Up-Date bagi warga yang berada di kawasan rawan bencana; 2. Mengoptimalkan kegiatan Pra-Bencana melalui Pencegahan dan kesiapsiagaan dengan mengedepankan peran Pentahelix Penanggulangan Bencana (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media Massa); 3. Menyediakan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana yang responsive; 4. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana dengan selalu berkordinasi dengan stakeholder terkait dengan motto "<i>Build Back Better and Saver</i>"

Sumber Renstra BPBD 2021-2026

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan

(*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome/hasil*) dari kegiatan (*output/keluaran*).

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Kebumen menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. IKU BPBD dirancang untuk mengukur capaian strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta efektivitas dalam penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. Dengan adanya IKU, BPBD dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan target pembangunan daerah dan nasional dalam bidang kebencanaan. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen adalah Persentase Desa Tangguh Bencana dengan formula pengukurannya yaitu:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Desa Tangguh Bencana}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$$

Gambar 3 Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja

Selain IKU, BPBD Kabupaten Kebumen juga mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan

Bencana Daerah Kabupaten/Kota. SPM ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Peraturan ini menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dalam konteks penanggulangan bencana. Tiga jenis pelayanan dasar yang diatur meliputi:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Memberikan informasi terperinci mengenai wilayah rawan bencana kepada masyarakat yang berada di kawasan tersebut, berdasarkan kajian risiko bencana.
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Melaksanakan serangkaian kegiatan pra-bencana, termasuk pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, untuk mempersiapkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Melakukan tindakan segera saat terjadi bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban, termasuk pencarian, pertolongan, dan evakuasi.

Implementasi SPM ini bertujuan memastikan bahwa setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana atau yang menjadi korban bencana menerima pelayanan dasar secara minimal. Pemerintah daerah kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan yang mendukung pemenuhan SPM tersebut, termasuk penyusunan dokumen kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana kontinjensi, serta pelaksanaan sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan gladi kesiapsiagaan bencana.

Dengan penerapan SPM ini, diharapkan penanggulangan bencana di daerah dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RJPMD Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan program unggulan **MEN-TAMBENG** (Kebumen Tanggap Bencana), merupakan upaya mendukung pelaksanaan misi kelima yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan Bermartabat. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama BPBD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana		Persentase Desa Tangguh Bencana	%
		Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%

BPBD Kabupaten Kebumen tidak hanya memiliki indikator kinerja umum (IKU), namun memiliki indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Indikator ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat dalam upaya pengurangan risiko, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana. SPM sub-urusan bencana mencakup tiga layanan utama, yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Indikator pertama, pelayanan informasi rawan bencana, memastikan bahwa masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu terkait potensi ancaman bencana, peta risiko, serta langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan. BPBD bertanggung jawab dalam melakukan pemetaan wilayah

rawan bencana dan menyebarluaskan informasi tersebut melalui berbagai media, termasuk sistem peringatan dini, aplikasi kebencanaan, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Indikator kedua, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, menitikberatkan pada upaya mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat serta pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan melalui penyusunan rencana kontinjensi, pelaksanaan pelatihan dan simulasi kebencanaan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyediaan infrastruktur penanggulangan bencana yang memadai. BPBD juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi kebencanaan, baik di sekolah, komunitas, maupun instansi terkait.

Indikator ketiga, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, berfokus pada respons cepat dan efektif dalam situasi darurat. BPBD harus memastikan bahwa sistem penanganan bencana dapat berjalan optimal dengan adanya tim reaksi cepat (TRC), mekanisme koordinasi lintas sektor, serta kesiapan sarana dan prasarana evakuasi. Selain itu, BPBD juga bertanggung jawab dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana, seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat pengungsian yang layak.

Dengan adanya indikator SPM ini, BPBD Kabupaten Kebumen dapat mengukur efektivitas pelayanan kebencanaan dan meningkatkan kualitas respons dalam setiap tahap penanggulangan bencana. Penerapan standar ini juga memastikan bahwa setiap warga negara yang berada di daerah rawan bencana mendapatkan hak atas pelayanan dasar yang berkualitas, sehingga mampu meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RJPMD tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan program unggulan “MEN-TAMBENG” atau Kebumen Tanggap Bencana merupakan upaya mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Misi ke-5 Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan Bermartabat. Target indikator kinerja sasaran strategis BPBD Kabupaten sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5 Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana		Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100	100	100
2.		Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100	100	100

Untuk indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dengan target indikatornya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 6 Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana

No	Jenis Layanan	Indikator	Satuan	Target/ Tahun
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase layanan informasi rawan Bencana	%	100
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan:							
1.	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Persentase DesaTangguh Bencana	%	100	-	100	-	-
2.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Persentase DesaTangguh Bencana	%	100	-	100	-	-

Untuk mendukung pencapaian target Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 diselenggarakan dengan Program dan Anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8 Program dan Anggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.3.736.442.000,00	
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp.5.636.760.000,00	
	Jumlah	Rp.9.373.202.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 menggambarkan capaian kinerja sasaran dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Indikator sasaran mencerminkan manfaat/hasil dari output yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan output, indikator kinerja input terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) dan indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Pengukuran Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil. Kriteria pencapaian sasaran maupun indikator sesuai dengan ketentuan dari PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 9 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	≥85 – 100%	Baik
3.	≥65 – 85%	Cukup
4.	≥50 – 65%	Kurang
	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan sasaran meningkatnya kesiapsiagaan bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2024

No	Tujuan/ sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
	Tujuan:					
1.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100	100	100	Baik
	Sasaran:					
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100	100	100	Baik

Capaian kinerja utama BPBD Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan indikator yang ditetapkan dan dihitung berdasarkan formula penghitungan, BPBD berhasil mewujudkan wilayah yang tangguh bencana pada semua desa/kelurahan yang berada di Kabupaten Kebumen sejumlah 460 (*empat ratus enam puluh*). Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas strategi mitigasi dan kesiapsiagaan yang telah diterapkan oleh BPBD dalam mendukung ketahanan daerah terhadap bencana.

Selain itu, sasaran peningkatan kesiapsiagaan bencana juga tercapai secara maksimal dengan persentase Desa Tangguh Bencana yang mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilakukan, seperti edukasi kebencanaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelatihan tanggap darurat bagi masyarakat, telah berjalan secara optimal. Dengan capaian ini, BPBD Kabupaten Kebumen dikategorikan memiliki kinerja yang baik dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah. Namun, upaya peningkatan dan evaluasi secara berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program dan kesiapsiagaan yang lebih adaptif terhadap berbagai potensi risiko bencana di masa depan.

3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja BPBD Kebumen Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 apabila disandingkan dengan capaian tahun-tahun yang lalu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Capaian Kinerja 2023 dan Target 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Tujuan:							
1.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100	100	100	100	100	100
	Sasaran:							
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja BPBD Kabupaten Kebumen dari tahun 2023 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan setiap tahunnya telah tercapai secara maksimal. Pada indikator utama, yaitu persentase Desa Tangguh Bencana, BPBD secara konsisten mencapai target 100% sejak tahun 2023 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kebijakan yang diterapkan dalam membangun ketangguhan wilayah terhadap bencana telah berjalan dengan baik dan efektif.

Demikian pula, pada sasaran peningkatan kesiapsiagaan bencana, capaian kinerja tetap stabil di angka 100% setiap tahunnya. Konsistensi ini mencerminkan keberhasilan BPBD dalam memastikan bahwa seluruh desa di Kabupaten Kebumen memiliki kesiapan yang optimal dalam menghadapi potensi bencana. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan upaya BPBD dalam melaksanakan berbagai program mitigasi, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan sistem penanggulangan bencana yang memadai.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas program di masa mendatang. BPBD perlu mengantisipasi tantangan baru serta terus meningkatkan inovasi dalam strategi penanggulangan bencana agar ketangguhan wilayah tetap terjaga dan dapat beradaptasi dengan berbagai dinamika risiko bencana yang mungkin terjadi di tahun-tahun berikutnya.

3.1.3. Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Capaian hasil untuk indikator kinerja BPBD Kabupaten Kebumen dengan target jangka menengah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Targer Jangka Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
	Tujuan:					
1.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sasaran:					
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %

Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024 yaitu 100% untuk indikator Desa Tangguh Bencana dan kesiapsiagaan bencana. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan bencana yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan berhasil meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah hingga tahun 2026, BPBD telah mencapai tingkat kemajuan 100%, yang berarti bahwa indikator utama sudah terpenuhi pada tahun 2024. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program yang telah dijalankan, termasuk edukasi kebencanaan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan sistem tanggap darurat.

Meskipun target akhir 2026 telah tercapai di tahun 2024, BPBD tetap perlu melakukan evaluasi dan penguatan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas ketangguhan desa dalam menghadapi ancaman bencana yang terus berkembang. Dengan demikian, keberlanjutan program dan inovasi kebencanaan menjadi aspek penting guna memastikan kesiapsiagaan yang lebih optimal di masa mendatang.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sekitar

Untuk perbandingan capaian dengan standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lain sebagai berikut:

Tabel 13 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota lain

No.	Tujuan/sasaran	Indikator kinerja	Realisasi 2024	Provinsi Jateng/ Kabupaten	Nasional	Capaian %
	Tujuan:					
1.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100 %	Na	Na	
	Sasaran:					
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100 %	Na	Na	

Realisasi kinerja BPBD Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 menunjukkan capaian 100% dalam indikator Desa Tangguh Bencana dan kesiapsiagaan bencana. Meskipun data pembanding dari tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lain belum tersedia, capaian maksimal ini mencerminkan komitmen kuat BPBD Kabupaten Kebumen dalam membangun ketangguhan wilayah terhadap bencana.

Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas ketangguhan bencana, BPBD tetap perlu melakukan *benchmarking* dengan standar nasional maupun daerah lain. Evaluasi terhadap aspek kualitas kesiapsiagaan, inovasi dalam mitigasi bencana, serta efektivitas program yang diterapkan di daerah lain dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan ketahanan bencana secara lebih komprehensif dan adaptif terhadap tantangan di masa depan.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja pada BPBD Kabupaten Kebumen, dilakukan analisis terhadap capaian yang telah diraih dalam periode pelaporan. Analisis ini mencakup identifikasi keberhasilan, kendala atau kegagalan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk perbaikan di masa mendatang pada BPBD Kabupaten Kebumen. Analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi capaian sasaran pada BPBD Kabupaten Kebumen disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 14 Analisis Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
	Tujuan:					
1.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100 %	100 %		
	Sasaran:					
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100 %	100 %	<p>Keberhasilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas Antara Bpbd dengan <i>Stakeholder</i> terkait, Pemerintah Desa Dan Fasilitator/ Relawan; - Adanya Kebijakan Daerah dalam Penguatan Destana Maupun Pemerintah Desa <p>Kegagalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua masyarakat desa memiliki kesadaran terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana; - Kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi - Faktor Alam dan Geografis Kabupaten Kebumen 	<p>Penguatan Destana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelatihan berkelanjutan; <p>Peningkatan Monitoring dan Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem pemantauan berbasis data untuk melihat perkembangan dan efektivitas Destana; dan - Melakukan intervensi bagi desa yang mengalami stagnasi dalam pengembangannya

Keberhasilan BPBD Kabupaten Kebumen dalam mencapai target 100% Desa Tangguh Bencana dan kesiapsiagaan bencana pada tahun 2024 tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara BPBD, *Stakeholder* terkait, Pemerintah Desa, serta fasilitator dan relawan kebencanaan. Selain itu, adanya kebijakan daerah yang mendukung penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) serta peran aktif pemerintah desa dalam implementasinya turut menjadi faktor utama dalam pencapaian ini. Kolaborasi ini memastikan bahwa program mitigasi bencana dapat berjalan secara efektif, mulai dari perencanaan, pelatihan, hingga implementasi di tingkat masyarakat.

Namun, meskipun capaian target telah terpenuhi, terdapat beberapa kendala yang masih perlu mendapat perhatian. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya masyarakat tidak peduli terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana. Hal ini dapat berdampak pada

rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam program Destana, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberlanjutan program di masa mendatang. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Destana di setiap desa masih belum optimal, sehingga sulit untuk mengukur efektivitasnya secara menyeluruh dan memastikan bahwa semua desa berkembang sesuai dengan standar kesiapsiagaan yang ditetapkan.

Sebagai solusi, BPBD Kabupaten Kebumen telah melakukan penguatan Destana melalui pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat dan relawan desa agar pemahaman terhadap kesiapsiagaan bencana semakin meningkat. Selain itu, BPBD juga berupaya membangun sistem pemantauan berbasis data untuk memantau perkembangan kesiapsiagaan di setiap desa serta melakukan intervensi bagi desa yang mengalami stagnasi dalam pengembangannya. Dengan pendekatan ini, diharapkan program Destana dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan meningkatkan ketangguhan wilayah terhadap bencana secara lebih efektif.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

BPBD Kabupaten Kebumen memiliki peran strategis dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana, yang memerlukan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dan tenaga yang digunakan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan wilayah yang tangguh bencana.

Efisiensi penggunaan sumber daya diukur dengan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan, seperti anggaran, waktu, tenaga kerja, dan material. Pengukuran efisiensi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa pemborosan atau penggunaan yang tidak perlu. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur efisiensi adalah rasio output terhadap input, yang mencerminkan seberapa efektif suatu program atau kegiatan dalam mencapai hasil yang diinginkan dengan sumber daya yang terbatas. Sementara itu, efektivitas dilihat dari sejauh

mana target yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat direalisasikan. Dengan kata lain, efisiensi menggambarkan sejauh mana sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal, sedangkan efektivitas mencerminkan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Kebumen guna pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 15 Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	
	Tujuan:							
1.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	100 %	100 %	100 %	9.373.202.000	8.853.767.131	94,46 %	5,54%
	Sasaran:							
2.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	100 %	100 %	100 %				

Berdasarkan hasil analisis efisiensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Kebumen, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung terwujudnya wilayah tangguh bencana telah dilakukan secara efisien. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.373.202.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp8.853.767.131 atau 94,46%, dan masuk kategori efisien, dimana terdapat penghematan anggaran sebesar 5,54% dari total alokasi tanpa mengurangi pencapaian target kinerja, yang tetap 100% terpenuhi.

Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah diimplementasikan dengan baik, menghasilkan output sesuai target, serta menggunakan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan. Efisiensi ini mencerminkan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tepat dalam mendukung kesiapsiagaan dan ketangguhan wilayah terhadap bencana.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Kebumen berhasil mencapai target kinerja dengan tingkat realisasi 100% pada indikator Desa Tangguh Bencana. Hal ini mencerminkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai perencanaan. Namun, tantangan masih dihadapi dalam meningkatkan pemahaman dan

kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana serta memastikan mekanisme monitoring dan evaluasi berjalan lebih optimal.

Sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas ke depan, BPBD Kabupaten Kebumen akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, meningkatkan kapasitas relawan, serta mengembangkan sistem pemantauan berbasis data untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penggunaan sumber daya semakin tepat sasaran dan mampu meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.

Sebagai penyelenggaran sub urusan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 menyelenggarakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatannya meliputi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatannya antara lain: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Capaian atas keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan pada BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yang berkaitan dengan pencapaian sasaran dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 16 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	% Capaian	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Tujuan:						
	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh bencana	100				
	Sasaran:						
	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase Desa Tangguh bencana	100	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penanggulangan Bencana	100	Menunjang
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan informasi rawan bencana	100	Menunjang
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100	Menunjang
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Menunjang
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan sistem dasar penanggulangan bencana	100	Menunjang

Program penanggulangan bencana bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang tangguh terhadap bencana. Salah satu indikator keberhasilannya adalah Persentase Desa Tangguh Bencana yang mencapai 100%, menunjukkan kesiapsiagaan yang optimal dalam menghadapi potensi bencana. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kesiapsiagaan bencana, yang juga diukur melalui indikator yang sama, yaitu Persentase Desa Tangguh Bencana, dengan capaian maksimal 100%.

Berbagai kegiatan dalam program ini telah berhasil mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Program Penanggulangan Bencana, misalnya, memiliki indikator kinerja berupa persentase pengelolaan penanggulangan bencana yang juga mencapai 100%, yang menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan strategi penanggulangan. Selain itu, kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota turut menunjang keberhasilan dengan pencapaian 100% dalam penyediaan layanan informasi rawan bencana.

Kegiatan lain yang turut berkontribusi adalah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, yang memastikan kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana

melalui layanan yang optimal, juga dengan capaian 100%. Selanjutnya, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana mencapai angka yang sama, mencerminkan respons cepat dan tepat dalam upaya penyelamatan korban. Terakhir, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang mencapai 100% menunjukkan bahwa sistem penanggulangan telah tertata dengan baik, sehingga mendukung kesiapsiagaan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, seluruh program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana telah berjalan dengan sangat baik dan sepenuhnya menunjang pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan sinergi yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam membangun ketangguhan wilayah terhadap bencana.

3.1.8. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemenuhan Pelayanan Dasar pada urusan Trantibumlinmas, khususnya dalam Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan melaksanakan pelayanan dasar yang meliputi:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/*Zoonosis* Prioritas. Dasar Pemikiran Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Sasaran Pelayanan Informasi rawan bencana di kabupaten kebumen adalah penduduk yang berada di wilayah rawan bencana sejumlah 726.453 KK yang berada wilayah dengan risiko sedang dan

tinggi. Jenis layanan dalam pelayanan Informasi Rawan bencana meliputi mutu layanan sebagai berikut:

- a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana;
- b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana;
- c. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kepada penduduk yg berada di wilayah rawan bencana melalui medsos BPBD (Twitter, Instagram, facebook, whatsapp dan radio RIG); dan
- d. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana;

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemii/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas. Dasar Pemikiran. Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemii/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas. Dasar Pemikiran Pelayanan

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah bahwa Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana meliputi mutu layanan sebagai berikut:

- a. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- b. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana; dan
- c. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana; dan
- d. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana.

Untuk capaian pemenuhan pelayanan dasar pada urusan Trantibumlinmas, khususnya dalam Sub-Urusan Bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana

No	Bidang/Urusan/Indikator	2022	2023	2024
Urusan Trantibum Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	100%
2.	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%
3.	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%

Analisis terhadap target dan realisasi capaian SPM Sub urusan bencana, sesuai dengan Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa terhadap 3 (tiga) jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana, indikator capaiannya bersifat output yang dihasilkan setiap tahunnya, sehingga target capaian selalu menyesuaikan dengan rencana output yang dihasilkan dengan menyesuaikan pagu anggaran yang disediakan.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran BPBD Kabupaten Kebumen tahun 2024 dialokasikan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Alokasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan respons terhadap bencana, sekaligus memastikan kelancaran administrasi dan koordinasi kebencanaan. Pembagian anggaran tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4 Anggaran BPBD Kebumen Tahun 2024

Realisasi keuangan BPBD Kabupaten Kebumen tahun 2024 mencerminkan upaya optimal dalam pengelolaan anggaran guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis di bidang penanggulangan bencana. Anggaran yang dialokasikan bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, serta respons terhadap bencana, sekaligus memastikan operasional pemerintahan daerah berjalan dengan efektif dan efisien. Rincian realisasi keuangan BPBD Kabupaten Kebumen tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 Realisasi Anggaran Tahun 2024

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA	
			Keuangan	Fisik	(Rp)	(%)
pro / keg / sub		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.736.442.000	3.487.114.715	93,33	249.327.285	6,67
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	15.974.700	99,84	25.300	0,16
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000	15.974.700	99,84	25.300	0,16
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.947.510.000	2.720.112.190	92,29	227.397.810	7,71
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.707.401.000	2.481.211.074	91,65	226.189.926	8,35
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	240.109.000	238.901.116	99,5	1.207.884	0,5

1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.295.000	209.308.331	99,53	986.669	0,47
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	6.893.500	98,48	106.500	1,52
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.225.000	38.162.000	99,84	63.000	0,16
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.400.000	17.400.000	100	0	0
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.492.000	99,68	8.000	0,32
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	37.170.000	36.499.000	98,19	671.000	1,81
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.000.000	107.861.831	99,87	138.169	0,13
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.687.000	227.427.911	94,89	12.259.089	5,11
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	997.000	99,7	3.000	0,3
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	108.224.260	90,19	11.775.740	9,81
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000	23.686.776	98,69	313.224	1,31
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.687.000	94.519.875	99,82	167.125	0,18
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.950.000	314.291.583	97,32	8.658.417	2,68
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	284.950.000	276.372.383	96,99	8.577.617	3,01
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	4.935.000	98,7	65.000	1,3
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	7.985.000	99,81	15.000	0,19
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	24.999.200	100	800	0
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.636.760.000	5.366.652.416	95,21	270.107.584	4,79
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	292.446.000	290.995.200	99,5	1.450.800	0,5
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	292.446.000	290.995.200	99,5	1.450.800	0,5
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.196.342.000	1.183.373.014	98,92	12.968.986	1,08
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	225.423.000	224.898.614	99,77	524.386	0,23
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	47.822.000	47.577.200	99,49	244.800	0,51
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	13.879.000	13.823.100	99,6	55.900	0,4
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	153.815.000	152.514.500	99,15	1.300.500	0,85
1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	16.461.000	16.338.400	99,26	122.600	0,74
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	350.000.000	341.363.500	97,53	8.636.500	2,47
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	55.466.000	55.236.800	99,59	229.200	0,41
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	333.476.000	331.620.900	99,44	1.855.100	0,56
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.412.300.000	2.274.605.169	94,29	137.694.831	5,71
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2.129.237.000	2.018.749.410	94,81	110.487.590	5,19
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	183.063.000	157.404.759	85,98	25.658.241	14,02

1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	98.451.000	98,45	1.549.000	1,55
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.735.672.000	1.617.679.033	93,2	117.992.967	6,8
1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	40.384.000	40.365.600	99,95	18.400	0,05
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	36.439.000	36.142.700	99,19	296.300	0,81
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	31.950.000	31.906.600	99,86	43.400	0,14
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.626.899.000	1.509.264.133	92,77	117.634.867	7,23
JUMLAH		9.373.202.000	8.853.767.131	94,46	519.434.869	5,54

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan dokumen pertanggungjawaban yang disusun oleh setiap instansi pemerintah, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. LKJiP berisi informasi mengenai capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi terhadap kendala yang dihadapi dan strategi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah, BPBD memiliki peran strategis dalam memastikan kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana. Oleh karena itu, penyusunan LKJiP BPBD bukan hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya.

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kebumen terus berkomitmen dalam mewujudkan wilayah tangguh bencana. Sepanjang tahun 2024, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil yang optimal. Berdasarkan evaluasi, capaian kinerja BPBD pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang baik, sebagai berikut:

- a. Capaian Indikator Kinerja: Seluruh target, termasuk pembentukan Desa Tangguh Bencana yang mencapai 100%, telah berhasil direalisasikan, mencerminkan efektivitas program kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;
- b. Standar Pelayanan Minimal (SPM): BPBD berhasil memenuhi kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, dengan hasil yang baik dalam pelayanan sub urusan bencana;
- c. Penanganan Darurat Bencana: BPBD menjalankan sistem peringatan dini, respon cepat, serta koordinasi yang baik dalam evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan pasca bencana, sehingga dampak bencana dapat diminimalkan; dan
- d. Penanganan Pasca Bencana: BPBD menggunakan Dokumen Jitupasna sebagai pedoman pemulihan, yang memuat identifikasi kerusakan, analisis kebutuhan, serta rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi secara terarah dan terukur.

Secara keseluruhan, BPBD Kabupaten Kebumen berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dan meningkatkan ketangguhan wilayah terhadap bencana.

4.2. Permasalahan/Kendala

Pada tahun 2024, BPBD Kabupaten Kebumen menghadapi beberapa kendala dalam penanggulangan bencana, antara lain:

- a. Keterbatasan SDM: Kurangnya jumlah dan kapasitas pegawai dengan keahlian spesifik dalam kebencanaan menghambat efektivitas tugas teknis dan administratif;
- b. Peningkatan Kualitas Desa Tangguh Bencana: Meskipun program Destana telah mencakup semua desa, sosialisasi dan pelatihan yang terbatas pada perwakilan desa mengurangi kesiapsiagaan masyarakat;
- c. Kendala Kegiatan Kedaruratan: Keterbatasan personel dengan keahlian spesifik dalam penyelamatan dan evakuasi menghambat respons cepat, terutama saat bencana besar;
- d. Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Beberapa infrastruktur yang terdampak bencana tidak dapat segera diperbaiki karena bukan kewenangan pemerintah daerah;
- e. Pendataan Penduduk: Pendataan berbasis *by name by address* belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi, menghambat mitigasi dan evakuasi;

Untuk mengatasi kendala ini, BPBD perlu meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, dan mengoptimalkan teknologi serta sistem informasi dalam penanggulangan bencana..

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Kebumen di masa mendatang meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Penguatan Kapasitas SDM: Meningkatkan pelatihan teknis untuk pegawai dan relawan dalam perencanaan, mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana. Pengembangan kompetensi dalam penyusunan regulasi dan kebijakan juga menjadi prioritas untuk meningkatkan efektivitas tugas BPBD;
- b. Optimalisasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana): Memperluas pelatihan kepada seluruh elemen masyarakat di desa sasaran, bukan hanya perwakilan, agar kesiapsiagaan bencana lebih merata dan berkelanjutan;

- c. Penguatan Sistem Tanggap Darurat: Menambah personel terlatih di BPBD dan PUSDALOPS serta meningkatkan kapasitas relawan, untuk mempercepat respons darurat dan efektivitas kaji cepat;
- d. Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana: Mempercepat koordinasi lintas sektor dan menyelesaikan masalah kewenangan terkait perbaikan infrastruktur, serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat;
- e. Perbaikan Pendataan Penduduk: Memastikan pencatatan by name by address sesuai regulasi untuk mempermudah perencanaan evakuasi, distribusi bantuan, dan program mitigasi.

Dengan langkah-langkah ini, BPBD Kabupaten Kebumen diharapkan dapat lebih efektif dalam penanggulangan bencana dan mewujudkan wilayah yang lebih tangguh serta responsif terhadap berbagai ancaman bencana di masa depan.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Arungbinang No.13 Kebumen Kode Pos 54311 Telepon (0287) 381240

Faksimile (0287) 3870807 Laman <https://bpbd.kebumenkab.go.id>

Pos-el bpbdkebumenkab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Udy Cahyono, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 7 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 196702261986071001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100		100		
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100		100		

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.496.315.000,-	APBD KAB. KEBUMEN
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 5.634.260.000,-	APBD KAB. KEBUMEN

Kebumen, 7 Maret 2024

Bupati Kebumen

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 196702261986071001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Arungbinang No.13 Kebumen Kode Pos 54311 Telepon (0287) 381240

Faksimile (0287) 3870807 Laman <https://bpbd.kebumenkab.go.id>

Pos-el bpbdkebumenkab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Udy Cahyono, M.Si
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 196702261986071001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100					100
	Sasaran :								
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100					100

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.496.315.000,00	Rp. 3.736.442.000,00	
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 5.634.260.000,00	Rp 5.636.760.000,00	

Kebumen, 26 Agustus 2024

Bupati Kebumen

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 196702261986071001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan :			
1	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100
	Sasaran :			
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100

Kebumen, 26 Agustus 2024
Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 196702261986071001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

